

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN:

Perspektif, Metodologi dan
Kasus Islam Indonesia



PUSTAKA PELAJAR

Buku **Sosiologi Pemerintahan : Perspektif, Metodologi dan Kasus Islam Indonesia** ditulis dengan tujuan untuk melengkapi literatur mata kuliah Sosiologi Pemerintahan yang diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia. Sementara terkait dengan kasus Islam yang ditampilkan di dalam buku ini memiliki tujuan sederhana karena Indonesia, mayoritas pemeluk agama adalah Islam sehingga kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat Islam akan berpengaruh pada Indonesia pada umumnya. Penganut Islam Indonesia mencapai 88,7 % dari total penduduk Indonesia yang mencapai 254 juta jiwa. Islam Indonesia dengan demikian sangat besar bahkan terbesar di muka bumi. Buku ini ditulis juga karena sepengetahuan penulis masih minimnya literatur dalam bidang Sosiologi Pemerintahan sebagai sebuah kajian yang multidisiplin dari ilmu sosial. Apalagi dalam kajian-kajian yang dikaitkan dengan masyarakat Islam Indonesia.

Kasus yang ditampilkan dari masyarakat Islam pun, penulis lebih memberikan penekanan pada kasus organisasi besar Islam Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU sebagai garda depan dan tumpuan untuk masyarakat sipil dari kelompok keagamaan yang sangat jelas peran sertanya dalam pemerintahan dan negara Indonesia. Tentu saja organisasi Islam lainnya berperan tetapi dalam buku ini tidak dibahas karena berbagai pertimbangan seperti masalah keterbatasan pokok bahasan yang disajikan. Oleh sebab itu perlu juga suatu saat dibahas dalam buku lainnya. Inilah dua organisasi Islam terbesar yang sangat diharapkan di Indonesia dibanding yang lainnya.

Buku ini akan sangat mungkin lebih “dekat dengan ilmu sosial” sosial dalam arti lebih umum, seperti sosiologi, ketimbang Ilmu Pemerintahan, tetapi penulis tidak bermaksud menjadikan ilmu Sosiologi itu sebagai ilmu Pemerintahan, tetapi malahan sebaliknya bahwa Ilmu Pemerintahan itu sebenarnya bagian dari Ilmu Sosial, termasuk Sosiologi, sehingga pendekatan sosiologi menjadi warna dalam penulisan buku ini. Ilmu Pemerintahan sudah menjadi disiplin tersendiri dalam kajian politik Indonesia. Ilmu Pemerintahan boleh dikatakan lebih “mapan” daripada Sosiologi Pemerintahan yang sekarang menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia. Tetapi sekali lagi, kasus-kasus Islam sangat jarang dibahas. Namun demikian, tidak berarti bahwa masyarakat di luar Islam tidak perlu dibahas, sangat penting. Tetapi karena sudah banyak yang membahas masyarakat di luar Islam, maka buku ini sengaja memberikan contoh kasus-kasus dalam Islam Indonesia.




PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail:pustakapelajar@yahoo.com
website:pustakapelajar.co.id

Daftar Isi

Pengantar Penulis ~ v

Daftar Isi ~ ix

BAB I PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI ~ 1

A. Pengertian ~ 2

B. Ruang Lingkup ~ 5

C. Metodologi ~ 9

Daftar Pustaka ~ 12

BAB II SOSIOLOGI POLITIK ISLAM INDONESIA: PERSPEKTIF DAN KARAKTERISTIK ~ 13

A. Pendahuluan ~ 14

B. Konfigurasi Islam Indonesia Kontemporer ~ 25

C. Islam Populer Indonesia ~ 55

D. Masa Depan Islam Indonesia ~ 59

E. Penutup 61

Daftar Pustaka 63

BAB III NEGARA ISLAM ISLAM DAN DEMOKRASI ~ 65

A. Pendahuluan ~ 65

B. Paham Demokrasi Islam ~ 72

- C. Posisi Islam Indonesia dalam Gelombang Demokrasi ~ 79
- D. Peran Islam Indonesia ~ 85
- E. Format Islam Indonesia ~ 93
- F. Substansi Demokrasi: Agama dan Sistem Politik Agar Lebih Bermakna ~ 97
- G. Penutup ~ 110
- Daftar Bacaan ~ 113

BAB IV MASYARAKAT SIPIL DAN PARTISIPASI POLITIK

ISLAM INDONESIA ~ 115

- A. Masyarakat Sipil, Masyarakat Mandiri ~ 115
- B. Kasus Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Baru di Indonesia ~ 117
 - 1. Pendahuluan ~ 117
 - 2. Karakteristik Gerakan Sosial Baru ~ 120
 - 3. Modal Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB) ~ 124
 - 4. Muhammadiyah sebagai Penyangga Utama Masyarakat Sipil ~ 127
 - 5. Ulama dan Kiai dalam Konteks Keindonesiaan ~ 133
 - 6. Ulama dan Keindonesiaan ~ 138
 - 7. Kiai dan Keindonesiaan ~ 140
- C. Penutup ~ 145
- Daftar Pustaka ~ 149

BAB V KEKUASAAN DAN KOMUNIKASI POLITIK DI

INDONESIA: MASALAH PEMILU, KIAI DAN KEKUASAAN SERTA KETIDAKADILAN GENDER ~ 151

- A. Pemilu 2014, Politik Biaya Mahal dan Partisipasi ~ 152
 - a. Politik Biaya Mahal ~ 153
 - b. Kaum Muda sebagai Bagian Masyarakat Sipil ~ 155
 - c. Kegaduhan Politik ~ 157

- d. Kegagalan Masyarakat politik ~ 159
- e. Peran Kaum Muda-Mahasiswa ~ 160
- f. Penutup ~ 161
- B. Ulama dan Kiai dalam Konteks Keindonesiaan ~ 162
 - a. Pendahuluan ~ 162
 - b. Konflik Warga Negara ~ 163
 - c. Ulama dan Keindonesiaan ~ 167
 - d. Kiai, Santri dan Keindonesiaan ~ 169
- C. Ketidakadilan Gender: Sebagai Masalah Sosiologi Pemerintahan ~ 174
 - a. Kisah-kisah sedih perempuan: Bentuk Ketidakadilan Gender ~ 177
 - b. Kesetaraan Gender ~ 185
 - c. Pekerjaan Perempuan ~ 188
 - d. Dilema Pendidikan: Adil Gender dan Multikultural ~ 191
- E. PENUTUP ~ 195
- Bahan Bacaan ~ 197

BAB VI REVITALISASI GERAKAN SIPIL: KASUS MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA ~ 199

- A. Posisi Strategis Ormas Keislaman ~ 200
- B. Paham Keislaman Muhammadiyah dan NU ~ 201
- C. Islam yang Dikembangkan ~ 212
- D. Nasionalisme Muhammadiyah dan NU ~ 220
- E. Sebagai Kekuatan *Civil Society* ~ 223
- F. MU-NU Sebagai Kekuatan *Civil Society* ~ 230
- G. Penutup: Bertumpu pada Muhammadiyah dan NU ~ 237
- Bahan Bacaan ~ 242

BAB VII PARTAI POLITIK INDONESIA, ISLAMISME DAN BIROKRASI ~ 244

- A. Memahami Partai Politik ~ 244

- B. Ideologi Pancasila dan Partai Politik ~ 257
 - a. Pertarungan Politik Keindonesiaan ~ 258
 - b. Ideologi Pancasila dan Partai Politik ~ 260
 - c. Prinsip Demokrasi Indonesia ~ 264
 - d. Partisipasi politik Dasar Kebangsaan ~ 273
 - C. Islamisme dan Partai Islam di Indonesia ~ 275
 - a. Islam Indonesia ~ 275
 - b. Kebangkitan Islamisme ~ 277
 - c. Partai Islam dan Demokrasi ~ 279
 - d. Suara Merosot ~ 279
 - e. Keberhasilan NU dan Muhammadiyah ~ 280
 - D. Muhammadiyah dan Politik Birokrasi ~ 283
 - a. Pendahuluan ~ 283
 - b. Muhammadiyah sebagai Arena ~ 287
 - c. Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja ~ 292
 - d. Penutup ~ 296
- Daftar Bacaan ~ 298

BAB VIII KONFLIK KEPENTINGAN DAN KELOMPOK STRATEGIS: MENGELOLA KEINDONESIAAN DAN SEKTARIANISME KEAGAMAAN ~ 300

- A. Pendahuluan ~ 302
 - B. Perdebatan Tentang Ideologi Kebangsaan ~ 308
 - C. Pilar Kebangsaan ~ 312
 - D. Nilai Dasar Kebangsaan ~ 316
 - E. Intoleransi Keagamaan ~ 320
 - F. Kekerasan atas Nama Agama ~ 328
 - G. Masalah Sektarianisme Intern dan Antaragama ~ 337
 - H. Isu Krusial Antaragama ~ 340
 - I. Penutup ~ 344
- Bacaan ~ 347

BAB IX PEMETAAN ULANG SOSIOLOGI PEMERINTAHAN
DAN SOSIOLOGI POLITIK INDONESIA ~ 348

- A. Sosiologi Pemikiran Muslim Indonesia ~ 349
- B. Kontestasi Islam Militan dan Moderat Islam ~ 357
- C. Konfigurasi Islam Indonesia ~ 362
- D. Masa Depan Islam Indonesia ~ 385
- E. Kasus Muhammadiyah dan Gerakan Islam Non-Mainstream ~ 388
 - a. Muhammadiyah sebagai Arena ~ 392
 - b. Gelombang Islam Indonesia Kontemporer ~ 397
 - c. Penutup ~ 403

Bacaan lebih lanjut ~ 406

BAB X PENUTUP: SOSIOLOGI POLITIK ISLAM DAN AGENDA
PENELITIAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN ~ 409

- A. Pendahuluan ~ 409
- B. Masa Depan Islam Politik ~ 411
- C. Konteks Islam Politik Indonesia ~ 420
- D. Penutup ~ 424

Daftar Pustaka ~ 436

Tentang Penulis ~ 439

Indeks ~ 440

BAB I

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

BAB ini secara khusus akan membahas hal-hal terkait dengan pengertian, ruang lingkup dan metodologi dari apa yang dinamakan dengan Sosiologi Pemerintahan. Pengertian Sosiologi Pemerintahan dalam kajian buku ini akan lebih banyak disajikan dengan cara yang sederhana disertai beberapa contoh yang terjadi di masyarakat, pemerintah serta kehidupan sehari-hari sehingga pembaca mudah memahaminya.

Demikian pula, ruang lingkup dari Sosiologi Pemerintahan disajikan dengan semudah mungkin sehingga memberikan penjelasan pada pembaca secara gampang, sekalipun bukan berlatar belakang Ilmu Pemerintahan, tetapi Ilmu Sosial secara umum, seperti sosiologi, ilmu politik, maupun ilmu sosiatri-kesejahteraan serta pengelolaan sosial.

Bab ini juga diberi penjelasan tentang metodologi yang dipergunakan dalam membahas Sosiologi Pemerintahan, sebagai bagian dari Ilmu Sosial yang terus berkembang dan saling berkait berkecenderungan antara satu dengan ilmu sosial lainnya. Dengan demikian, diharapkan memudahkan memahami Sosiologi Pemerintahan dari

sudut pandang Ilmu Sosial lain yang merupakan payung dari ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi Pemerintahan. Ilmu sosial sendiri awalnya dipandang kurang mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak dibanding ilmu-ilmu murni (sains) seperti Matematika, Fisika, maupun Kimia. Tetapi dalam perkembangannya ilmu sosial juga memberikan kontribusinya secara alamiah (naturalistik) dan sesuai kebutuhan makhluk hidup yang senantiasa mengalami dinamika (dinamis).

A. PENGERTIAN

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang membahas gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat luas. Di dalamnya berkaitan dengan persoalan struktur sosial/kelas sosial, relasi sosial, lembaga-lembaga atau organisasi sosial yang saling berkelindan atau saling terhubung antara satu dengan lainnya.

Secara detail John Scott, (2002) memberikan penjelasan tentang ruang lingkup Ilmu Sosial itu sebagai induk ilmu sosiologi membahas hal-hal seperti kelas sosial, perubahan sosial, pekerjaan sosial, lembaga sosial, relasi sosial, gerakan sosial, struktur sosial, tindakan sosial, deferensiasi kebudayaan, konflik sosial serta rasionalisasi modernisasi sosial.

Sementara itu, George Ritzer (2004), dengan mengutip August Comte (1798-1857), menyatakan bahwa ilmu sosiologi akan menjadi ilmu yang penting dan berpengaruh ketika dunia ini terus mengalami perubahan bahkan banyak anarkis. Oleh sebab itu, Comte kemudian mengembangkan apa yang dinamakan dengan statistika sosial atau kemudian dikenal dengan istilah sosiologi pada 1839. Istilah statistika sosial oleh Comte diharapkan menjadi ilmu yang dominan sebagaimana *hard sciences* yang akan mempelajari struktur sosial yang ada dan *social dynamics* (dinamika sosial atau perubahan sosial). Perubahan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam

masyarakat sebagai bagian dari reformasi sosial, soal penyakit sosial dan reformasi bahkan revolusi. (Ritzer, 2004: 17)

Selain itu, jika mengikuti Emile Durkheim, (1858-1999: 17), sosiologi merupakan ilmu yang membahas masalah fakta-fakta sosial. Fakta sosial itu terdapat dua kategori yakni, fakta sosial non-material dan fakta sosial material. Fakta sosial non material misalnya kultur, struktur sosial, dan institusi sosial. Sedangkan fakta sosial material misalnya adalah birokrasi dan hukum. Fakta-fata sosial non material lainnya seperti suicide (bunuh diri), perbedaan-pembedaan pekerjaan (*division of labor*), radikalisme (agama), dan pengalaman-pengalaman keagamaan lainnya. Oleh sebab itu, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji fenomena sosial sebagai fakta hidup dalam masyarakat, periksa Emile Durkheim, *The Rule of Sociological Method*, 1895/1896.

Sementara jika mengikuti pandangan Karl Marx, ilmu sosial itu tidak boleh meninggalkan pembahasan tentang pembagian kerja dalam masyarakat. Selain juga membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia, sebab antara manusia dengan binatang memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kebutuhan manusia mengalami perubahan-perubahan secara terus menerus, sementara kebutuhan binatang tidak berubah-ubah. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan pekerjaan (manusia bekerja, antar pemilik usaha selalu kreatif-saling bersaing, menyesuaikan lingkungannya) dan inilah landasan utama kenapa manusia bekerja- dan kemudian bersaing lalu memunculkan konflik. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengkajian yang serius tentang proses-proses kehidupan sosial yang konkret dan yang mutlak bagi manusia. (Karl Marx, *Capital*, jilid 3, 1970; hlm. 43).

Sedangkan, Max Weber, lebih mengonsentrasikan pada persoalan-persoalan spirit kapitalisme-religius atau spirit ekonomi yang dikatakannya ada kaitannya dengan agama, khususnya Calvinis-Protestan. Max Weber mencurahkan perhatiannya pada agama

dunia yang di satu pihak merintang perkembangan ekonomi, tetapi di lain pihak mendorong semangat kapitalisme. Menurut Weber bahwa gagasan otonom akan sangat berpengaruh pada ekonomi dunia, dan semuanya ada hubungannya dengan gagasan-gagasan keagamaan. Di mana gagasan ekonomi ini kemudian mendorong adanya semangat kapitalisme yang akhirnya mendorong lahirnya ekonomi kapitalis. (Max Weber, *The protestan Ethic and The Spirit of Capitalism* (1905/1958))

Beberapa penjelasan tentang ilmu sosial (sosiologi di atas) secara keseluruhan berhubungan dengan persoalan manusia, yang saling tergantung dan saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Di sana kita menemukan persoalan dinamika sosial, struktur sosial, institusi sosial, jaringan sosial, birokrasi, hukum, maupun patologi-penyakit-penyakit sosial seperti terjadinya penyimpangan hukum (korupsi, KKN dan manipulasi) dan konflik sosial. Oleh sebab itu, ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi menjadi penting dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan yang kemudian memunculkan *Ilmu Sosiologi Pemerintahan*.

Secara sederhana Sosiologi Pemerintahan adalah sebuah Kajian yang menelaah tentang gejala-gejala umum dan khusus dalam masyarakat antara yang diperintah (masyarakat warga) dan memerintah (para pengambil kebijakan). Pengambil kebijakan adalah mereka yang membuat berbagai macam peraturan, keputusan dan agar ada yang melaksanakan. Sementara yang melaksanakan adalah masyarakat sebagai penerima kebijakan pemerintah. (Nyoman Sumaryadi, 2010: 25)

Selain itu juga, Sosiologi Pemerintahan merupakan kajian yang membahas tentang berbagai upaya/cara yang dikerjakan oleh pemerintah terhadap berbagai macam tuntutan warga negara. Beberapa tuntutan warga negara misalnya terkait dengan kesejahteraan, keadilan hukum, pelayanan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, serta pembangunan jalan raya untuk

transportasi. Sementara, kewajiban warga negara adalah membayar pajak, membayar penggunaan listrik, penggunaan air, dan pajak penghasilan. Semua kewajiban warga negara ini dipergunakan oleh negara/pemerintahan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat sebagai bentuk kewajiban negara/pemerintahan pada rakyat.

Sementara itu, *Sosiologi Pemerintahan* juga melakukan pembahasan terkait dengan masalah-masalah yang memerintah (pemerintah/negara) dan yang diperintah (masyarakat) maka di dalamnya menyangkut relasi sosial, organisasi sosial, sistem sosial, kelas sosial serta proses-proses sosial. Persoalan relasi sosial adalah persoalan hubungan dalam masyarakat dari berbagai macam tingkatan, dari masyarakat paling rendah (rakyat kere) dengan rakyat kere; demikian pula masyarakat kelas menengah dengan kelas menengah sampai dengan kelas atas dengan kelas atas. Semua persoalan sosial kemasyarakatan merupakan bagian dari kajian Sosiologi Pemerintahan sebagaimana definisi yang dikemukakan.

B. RUANG LINGKUP

Sosiologi Pemerintahan secara menyeluruh membahas kondisi-kondisi sosial yang terkait dengan hubungan antarmanusia, legitimasi sosial, keterwakilan, partisipasi masyarakat, harmoni dan integrasi sosial, konflik dan kepemimpinan. Masalah-masalah ini dalam kajian Sosiologi sangat jelas sekali berkaitan dengan persoalan struktur dan institusi sosial yang sifatnya sangat dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berlangsung. Sedangkan dalam kajian Sosiologi Pemerintahan semua masalah ini berhubungan dengan urusan timbal balik antara anggota masyarakat baik sebagai warga negara atau sebagai pelayan masyarakat. Sebagai warga negara adalah yang berhak dilayani oleh para pengambil atau pemberi kebijakan, sementara sebagai pelayanan masyarakat mereka adalah para pegawai atau para pengambil ke-

bijakan pemerintahan. Inilah yang dinamakan hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemerintah.

Selain soal hubungan antar-manusia dalam Sosiologi Pemerintahan juga dibahas masalah yang terkait dengan Tanggung Jawab Negara. Dalam Sosiologi Pemerintahan soal Tanggung Jawab Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator masyarakat sehingga mereka mendapatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Masyarakat dikuatkan kemampuannya sehingga memiliki daya saing yang bagus dengan masyarakat negara lain. Selain itu, masyarakat juga diberi fasilitas pembangunan baik pembangunan sosial maupun pembangunan fisik. Pembangunan masyarakat karena itu sering dikatakan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, yakni pembangunan jiwa dan raga. Pembangunan fisik dan nonfisik. Material dan imaterial, spiritual.

Sosiologi Pemerintahan juga secara khusus membahas masalah Warga Negara kaitannya dengan masyarakat sipil, warga bangsa (*nation state*), lembaga sosial dan kelompok sosial, masyarakat politik, non sipil (TNI dan Polisi). Masalah masyarakat sipil menjadi pembahasan sendiri dalam sosiologi pemerintahan karena peranan dan posisinya yang tidak bisa dianggap sepele. Masyarakat sipil (*civil society*), khususnya seperti ormas-ormas keagamaan (dalam Islam), baik Muhammadiyah maupun NU merupakan ormas Islam yang sangat penting di Indonesia karena kontribusinya dalam membangun kemajuan bangsa dan keadaban bangsa.

Karakteristik masyarakat sipil seperti mandiri, tidak selalu menjadi partai politik, bergerak dalam level yang lebih substansial ketimbang artifisial, memberdayakan masyarakat, memiliki pengaruh pada penguatan bangsa dan gerakan politik, menjadi hal yang sangat signifikan dalam sebuah negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, tentang masyarakat sipil dalam buku ini akan diberi contoh dari ormas keagamaan (Muhammadiyah dan NU) yang telah sangat tua dan berkontribusi nyata dalam membangun ke-

indonesiaan dan memberdayakan masyarakat.

Namun demikian, dalam pembahasan masyarakat sipil juga akan disinggung hal-hal yang berkaitan dengan warga negara serta pengaruh negara lain dalam membangun negara Republik Indonesia, sehingga kehadiran Indonesia pada akhirnya memang tidak bisa diisolasi dari negara lain. Indonesia menjadi incaran negara lain karena kekayaan alam yang dimiliki melimpah sementara sumber daya manusianya masih berada di bawah kemampuan negara-negara maju di Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa maupun Amerika. Pendek kata Indonesia akan terpengaruh dari kehadiran negara-negara lain yang ada di seluruh dunia.

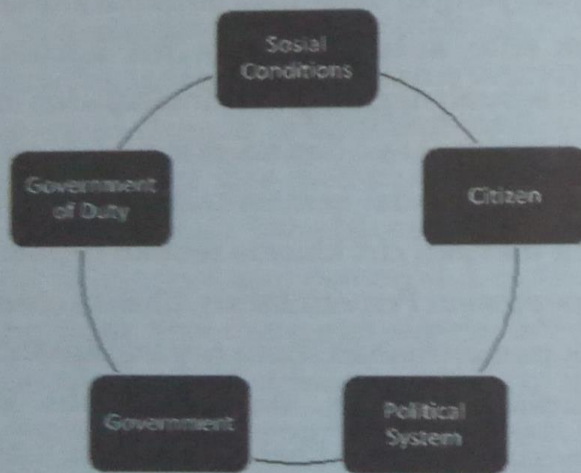
Sosiologi Pemerintahan juga secara khusus membahas persoalan Pemerintahan yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok yakni kelompok elite, kelas rakyat, politik kekuasaan, etika-nilai yang dianut oleh sebuah negara-pemerintahan dan masyarakat yang diperintah, struktur birokrasi dan karakteristik birokrasi, organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan non keagamaan dan kelas sosial yang menjadi ciri khusus sebuah negara.

Persoalan-persoalan Pemerintahan dibahas untuk diketahui bagaimana bentuk pemerintahan suatu negara, apakah pemerintahan otoriter, demokratis, komunis, ataukah sosialis. Begitu pula karakteristik pemerintahannya liberal, kapitalis, ataukah khilafah islamiyah (kerajaan), ataukah demokrasi seperti Indonesia yakni demokrasi Pancasila. Kita juga membahas masalah partai politik, apakah sistem paramenter, presidensial, ataukah monolitik, pluralistik atau multipartai menjadi kajian dalam Sosiologi Pemerintahan untuk memahami kondisi partai politik yang ada di sebuah negara.

Selain dari masalah pemerintahan dan partai-partai politik, secara khusus di bawah pula Sistem Politik sebuah negara. Apakah sebuah negara menganut sistem politik demokrasi, otoriter, monarki, ataukah yang lain. Bagaimana bentuk komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintahan, apakah dengan cara tradisional

yakni langsung orang perorang menghadap seorang kepala negara ataukah perwakilan yang kita kenal dengan nama demokrasi ataukah dengan cara mewakilkan kepada para pejabat kerajaan sehingga seperti kerajaan ataukah yang lainnya. Selain itu juga dibahas bagaimana negara mengelola sebuah pemerintah apakah dengan cara profesional, sehingga memiliki profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat (publik) ataukah tertutup sehingga cenderung koruptif dan diktator karena rakyat tidak bisa mengakses kebijakan. Secara sederhana wilayah kajian (ruang lingkup Sosiologi Pemerintahan) adalah:

Diagram dari Ruang Lingkup Sosiologi Pemerintahan



Kelima hal di atas dibahas secara simultan sehingga tidak ada yang diposisikan sebagai posisi paling top atau paling penting, namun semuanya saling memengaruhi dan penting sebagaimana posisinya. Kelima hal itulah yang sebenarnya akan menjadi ciri khas bagaimana Sosiologi Pemerintahan berbeda dengan kajian Sosiologi Politik atau Ilmu Politik. Dimensi pemerintahan dan tanggung jawab negara serta warga negara sama-sama mendapatkan perhatian yang sama dalam konteks sistem politik sebuah negara yang tidak

dapat dipisahkan dari kondisi sosial sebuah masyarakat dalam negara.

Kondisi sosial sebuah masyarakat akan memberikan peta jalan dan gambaran umum hal-hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak mengalami kerusakan secara sosial dan personal. Kondisi objektif masyarakat harus menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan sehingga kebijakan tidak boleh salah arah dan bertabrakan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jika selama ini banyak kebijakan tidak sesuai dengan kondisi objektif masyarakat karena kondisi sosial sering tidak dijadikan pertimbangan yang penting bahkan diabaikan sehingga kebijakan kontraproduktif. Oleh sebab itu, kondisi sosial (masyarakat) dalam sebuah negara tidak bisa diabaikan ketika pemerintah akan mengambil kebijakan sebab akan berpengaruh pada kebijakan yang hendak dilakukan agar tidak bertentangan dengan realitas objektif sebagai pertimbangan utama pemerintah sebagai pembuat kebijakan negara dan masyarakat (warga) sebagai penerimanya.

C. METODOLOGI

Untuk memahami persoalan-persoalan yang diuraikan di dalam buku ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang lazim dalam ilmu sosial humaniora yakni menggunakan metode sosiologi bertujuan menguraikan varian-varian yang terdapat di dalam sebuah gejala untuk menunjukkan adanya kesinambungan keterkaitan antar gejala yang muncul dan kaitannya dengan aspek pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan disebabkan masyarakat adalah sebuah entitas yang dinamik, selalu berubah dan membutuhkan penjelasan secara sosial bukan sekadar secara matematis dan ilmu pasti. Hampir tidak ada yang pasti dari masyarakat kecuali ketidakpastian itu sendiri yang menjadi bagian dari hidupnya.

Pendekatan atau metodologi sosiologi dipergunakan dalam membahas Sosiologi Pemerintahan dimaksudkan agar para pengkaji

masyarakat memahami secara garis besar persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat berdasarkan kecenderungan yang muncul. Kenapa sebuah komunitas atau masyarakat berperilaku berbeda dengan masyarakat lainnya padahal sama-sama berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai petani misalnya. Penyimpangan-penyimpangan apa yang menyebabkan terjadi di dalam masyarakat padahal berada pada waktu dan tempat yang sama. Inilah perlunya sosiologi memberikan kerangka umum pada Sosiologi Pemerintahan. Tanpa memahami kecenderungan, perilaku, sikap dan faktor-faktor penyebab yang terjadi dalam masyarakat akan sangat dimungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan yang menyesatkan alias *muspro*.

Selain itu penulis juga mempergunakan pendekatan antropologis untuk menguraikan hal-hal yang merupakan persoalan-persoalan subjek masyarakat sebagai masalah yang harus diuraikan secara detail sehingga diketahui apa penyebab, karakteristik, ciri khas, serta gejalanya itu sendiri. Masing-masing subjek yang ada di dalam masyarakat menjadi sangat penting diketahui oleh para pengambil kebijakan seperti karakteristik masyarakat Jawa di desa yang berprofesi sebagai petani perlu dijelaskan detail karena akan berbeda dengan karakteristik masyarakat desa yang berprofesi menjadi buruh pabrik atau menjadi ambtenar (pegawai sipil rendahan atau sebagai priayi Jawa. Demikian pula karakteristik masyarakat kota kecil sebagai pedagang akan berbeda dengan karakteristik masyarakat kota besar yang berprofesi sebagai pedagang.

Hal-hal seperti itu dalam metodologi antropologi klasik perlu mendapatkan perhatian. Demikian pula dalam antropologi budaya kontemporer. Apalagi dalam membahas masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan negara yang hendak diarahkan kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan, maka seorang pengambil kebijakan atau para pembuat kebijakan harus memahami detail-

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Islam Substantif*, Mizan, Bandung, 2004.
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam, and Democracy*, ICIP, Jakarta, 2007.
- Daniels, Timothy, *Islamic Spectrum in Java*, Ashgate, England, 2009).
- Effendi, Djohan, *A Renewal Without Breaking Tradition*, Interfidei, Yogyakarta, 2008.
- Hardiman, F. Budi, *Ruang Publik*, Kanisius, Jogjakarta, 2010.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, Bandung, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, The Wahid Institute, Jakarta, 2008.
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syari'ah dan Reproduksi Ideologi NII di Indonesia*, PSAP, Jakarta, 2007.
- Qodir, Zuly, *Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Qodir, Zuly, edisi Revisi, *Islam Liberal: Wacana Baru Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Qodir, Zuly, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam Indonesia*, LKiS, Yogyakarta 2010.
- Turner, Bryan S., *Sociology of Religion*, The new Blackwell Companion,

- Inggris, 2010.
- Woodward, Mark, *Java, Indonesia and Islam*, Springer, London and New York, 2011.
- Pip Jones, *Ilmu-Ilmu Sosial*, UI Jakarta, 2009.
- Sunyoto Usman, *Sosiologi Sebagai Pengantar, Sejarah dan Metodologi*, UGM, 2009.
- Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik*, UGM, 2008.
- George Ritzer, *Teori Sosial Modern*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern*, UI Press, 1984.
- John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Pustaka Pelajar, 2013.
- I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, 2007.
- Islamization and Nationalism dalam sub title Formation of the Indonesia State*, (2010) dan Masdar Hilmi dalam bab Islam and Discourses on Democracy in Indonesia dalam sub title Islam and Democracy: a Fluctuating relationship. (Periksa Askar Salim, *Challenging The Seculaer State*, ISEAS, Singapore 2011 dan Masdar Hilmi, *Islamism amd Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*, ISEAS Singapore, 2011).
- Fazlur Rahman, *Pintu Ijtihad*, (Pustaka, Bandung, 1987).
- Katleen Witson, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*, Routledge USA 2009).
- Ahmad Syaii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, Bandung, 2009).
- Samuel Huntington, *The Clash of The Civilization*, Asian Weeks, USA, 1997.
- Burhan D. Magenda, 1991, *Islam dan Golkar: Bentuk-bentuk Sikap Politik Umat Islam*, juga M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta 2000).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* halaman 284-285).

- Periksa Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Firdaus, 2004, Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991).
- Robert Hefner, 2001 (ed), *Democratic Civility: The History and Cross Cultural Possibility of Modern Political Ideal*, (Transaction Publication, New Jersey, USA).
- John L Esposito, *Islam Warna Warni*, Paramadina, Jakarta, 2008).
- Kamal Hasan, *Muslim Intellectual Responses to New Order Modernization in Indonesia*, Dewan Bahasa dan Pelajar Malaysia, Kuala Lumpur, 1982).
- Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, Kompas, Gramedia, 2007.
- Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Jangan Saling Mengkafirkan, Agama, Polisi dan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, 2011).
- Rizal Sukma, *Indonesia Election's 2009: Defective System*, dalam *Problems of Democratization in Indonesia*, Edward Aspinal dan Marcus Mietzner (ed), ISEAS, Singapura, 2010. *Tentang perolehan suara Legislatif dan Presiden*, (lihat Perolehan suara KPU, 2009)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna*, (Gramedia Jakarta, 2010).
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999).
- Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Kontestasi Ruang Politik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010).
- Irfan S. Awwas (ed) *Risalah Kongres Mujahiddin I*, (Yogyakarta, Wihdah Press, 2000).